

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini akan membahas teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, dimulai dari pengertian umum sampai pada pengertian yang fokus pada permasalahan yang sedang dibahas untuk menghimpun informasi yang relevan. Sehingga dapat menjadi sebuah acuan dasar teori untuk objek yang akan diteliti.

2.1.1 Audit Internal

Pada zaman modern saat ini perkembangan manajemen organisasi khususnya di perusahaan sangat memerlukan peran dari audit internal, karena audit internal memiliki peranan penting dalam keberjalanan suatu perusahaan. Audit internal digunakan untuk mendukung keberjalanan manajemen perusahaan sebagai fungsi *controlling* yang menjamin perusahaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan mengarah kepada tujuan.

2.1.1.1 Pengertian Audit Internal

Menurut *Institute of Internal Auditor* yang dikutip oleh Arens dkk (2015:432) dan di alih bahasakan oleh Herman Wibowo, menyatakan bahwa:

“Audit internal adalah aktivitas konsultasi dan assurance yang objektif serta independen yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Hal tersebut membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola”

Sedangkan menurut Hery (2017:238) audit internal adalah sebagai berikut:

“Audit internal adalah suatu fungsi penelitian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pemeriksaan intern melaksanakan aktivitas penelitian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan- kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanannya pada manajemen”.

Hal senada dikemukakan oleh Hiro Tugiman (2014:11) bahwa audit internal atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengavaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan”. Adapun menurut *The Commite On Basic Auditing Concept* didalam William F. Messier, dkk (2014:12) audit internal adalah sebagai berikut:

“Auditing adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kepentingan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Berdasarkan keempat pengertian yang dikemukakan para pakar di atas, dapat dikatakan bahwa audit internal adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan objektif pada suatu organisasi untuk membantu mengavaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Audit internal diharapkan dapat membantu semua tingkatan manajemen, agar kewajiban-kewajibannya dapat dilaksanakan secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

2.1.1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Pada umumnya, tujuan adanya audit internal di dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah untuk membantu seluruh anggota organisasi khususnya pihak

manajemen dalam menganalisis dan mengawasi tanggungjawab masing-masing anggota, apakah telah berjalan efektif dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut Sukrisno Agoes (2013:205) tujuan audit internal menyatakan bahwa:

“Tujuan Audit Internal adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam menyelesaikan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, dan komentar mengenai kegiatan pemeriksaan”.

Sedangkan menurut Hery (2016:281) tujuan utama pemeriksaan internal adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk meyakinkan keandalan informasi.
- 2) Untuk memastikan kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Untuk meyakinkan perlindungan terhadap harta.
- 4) Untuk meyakinkan penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien,
- 5) Untuk meyakinkan pencapaian tujuan.

Hal senada dikemukakan oleh Alfred F. Kaunang (2013:5) menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) tujuan atau sasaran dilakukannya aktivitas audit internal, yaitu:

- 1) Penilaian yang independen dan rekomendasi kepada manajemen.
- 2) Melayani kepentingan manajemen.

Dalam melaksanakan aktivitas pemeriksaan internal, terdapat hal-hal yang perlu untuk diperhatikan serta ditaati oleh auditor internal, salah satunya adalah terkait dengan ruang lingkup kegiatan pemeriksaan audit internal, berikut adalah beberapa pendapat ahli mengenai ruang lingkup audit internal.

Menurut Mulyadi (2010:212), ruang lingkup pemeriksaan internal harus:

- 1) Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasi serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi dan melaporkan informasi tersebut.
- 2) Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaian dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.
- 3) Mereview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.
- 4) Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya.
- 5) Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan konsisten dengan tujuan dan sarana yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Sedangkan menurut Alfred F. Kaunang (2013:6), ruang lingkup aktivitas audit internal adalah sebagai berikut:

- 1) Penilaian yang bebas atas semua aktivitas di dalam perusahaan (induk dan anak perusahaan). Dapat menggunakan semua catatan yang ada dalam perusahaan/grup perusahaan, dan memberikan advice kepada pimpinan perusahaan, baik direktur utama maupun direktur lainnya.
- 2) Me-review dan menilai kebenaran dan kecukupan data-data akuntansi dan keuangan dalam penerapan untuk pengawasan operasi perusahaan.
- 3) Memastikan tingkat dipatuhinya kebijaksanaan, perencanaan, dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 4) Memastikan bahwa harta perusahaan telah dicatat dengan benar dan disimpan dengan baik sehingga dapat terhindar dari pencurian dan kehilangan.
- 5) Memastikan dapat dipercayainya data-data akuntansi dan data lainnya yang disajikan oleh perusahaan.
- 6) Menilai kualitas dan pencapaian prestasi manajemen perusahaan berkenaan dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pemegang saham.
- 7) Laporan dari waktu ke waktu kepada manajemen dari hasil pekerjaan yang dilakukan, identifikasi masalah, dan saran/solusi yang harus diberikan.
- 8) Bekerja sama dengan eksternal auditor sehubungan dengan penilaian atas pengendalian internal (internal control).

2.1.1.3 Tahap Pelaksanaan Audit Internal

Pelaksanaan audit internal merupakan tahapan penting yang dilakukan oleh seorang auditor internal dalam proses auditing untuk menentukan prioritas, arah dan pendekatan dalam proses audit internal. Di dalam pelaksanaan audit internal terdapat tahap-tahap penting yang harus dilaksanakan agar dapat menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan oleh manajemen, agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut *The Institute of Internal Auditor* (2017:39) pelaksanaan tugas audit yaitu, sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Audit sebagai langkah awal perencanaan audit ini berisikan:
 - a) Menyusun tujuan dan lingkup audit
 - b) Mendapatkan informasi mengenai aktivitas yang akan diaudit
 - c) Menentukan sumber-sumber penting dalam melakukan audit
 - d) Memberitahukan kepada auditor mengenai pelaksanaan audit
 - e) Melaksanakan atau tepatnya survey terhadap risiko, pengendalian untuk mengetahui luas audit yang akan dilaksanakan dan meminta komentar dan saran audit.
 - f) Menyusun program
 - g) Menentukan bagaimana, kapan dan siapa yang membutuhkan hasil dari audit pengesahan rencana audit.
- 2) Pengujian dan Pengevaluasian Informasi
Untuk melakukan pengujian dan pengevaluasian auditor internal harus mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil audit
- 3) Menyampaikan hasil pemeriksaan
Auditor internal harus menyampaikan atau melaporkan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil audit.
- 4) Tindak lanjut hasil pemeriksaan
Pemeriksaan internal harus terus meninjau atau melakukan *follow up* untuk memastikan bahwa terdapat temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindak lanjut tepat.

2.1.1.4 Standar Profesional Audit Internal

Agar pelaksanaan audit internal berjalan dengan baik maka harus ada suatu standar khusus yang dilengkapi dengan pedoman yang tepat dari suatu istilah yang digunakan untuk memenuhi standar tersebut.

Praktek standar profesional audit internal menurut Hery (2016:265) terbagi atas lima macam diantaranya yaitu:

1) Independensi

Auditor yang independen adalah auditor yang tidak terpengaruh oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam audit. Dalam melaksanakan kegiatannya auditor internal harus bertindak secara objektif. Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh internal auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Dengan adanya independensi dan objektivitas, pelaksanaan audit internal dapat dijalankan dengan efektif dan hasil audit akan objektif. Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Independensi dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektivitas untuk mencegah berbagai bentuk kecurangan dan manipulasi, berikut dijelaskan lebih lanjut mengenai status organisasi dan sikap objektif yaitu:

- a) Status Organisasi, status organisasi audit internal harus memadai sehingga memungkinkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengungkap dan mencegah segala bentuk *fraud* dengan baik serta harus mendapatkan dukungan dan persetujuan dari puncak pimpinan.
- b) Objektivitas, Objektivitas adalah bahwa seorang auditor internal dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya harus mempertahankan sikap mental yang independen dan kejujuran dalam melaksanakan pekerjaannya. Agar dapat mempertahankan sikap tersebut auditor internal tidak boleh ditempatkan dalam suatu keadaan yang membuat mereka tidak dapat melaksanakan penilaian profesional yang objektif.

2) Kemampuan Profesional

Seorang auditor internal harus mencerminkan keahlian dan kemampuan profesional. Kemampuan profesional auditor internal meliputi :

- a) Unit Audit Internal
- Personalia : harus memberikan jaminan keahlian teknis dan latar belakang pendidikan internal auditor yang akan ditugaskan.
 - Pengawasan : unit audit internal harus memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal diawasi dengan baik.
- b) Auditor Internal
- Kesesuaian dengan standar profesi : pemeriksa internal harus mematuhi standar profesionalisme dalam melakukan pemeriksaan dalam melindungi organisasi atau perusahaan dari kemungkinan terjadi kecurangan.
 - Pengetahuan dan kecakapan : pemeriksa internal harus memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan. Hubungan antar manusia berkelanjutan : pemeriksa internal harus memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif.
 - Pendidikan berkelanjutan : pemeriksa internal harus mengembangkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan.
 - Ketelitian profesional : pemeriksa internal harus bertindak dengan ketelitian profesional yang seharusnya.
- 3) Lingkup Pekerjaan
- Lingkup pekerjaan audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh perusahaan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan yang mengandung arti bahwa :
- a) Keandalan informasi : pemeriksa internal harus memeriksa keandalan informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan kecurangan informasi.
 - b) Kesesuaian dengan kebijakan, rencana-rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk ditaati.
 - c) Perlindungan terhadap harta : Memeriksa sejauh mana kekayaan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan diamankan terhadap segala macam kerugian atau kehilangan.
 - d) Penggunaan sumber daya secara ekonomi dan efisien : pemeriksa internal harus menilai keekonomisan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada.
 - e) Pencapaian tujuan : pemeriksa internal menilai mutu hasil pekerjaan apakah ada indikasi kecurangan dalam melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban yang diserahkan serta memberi rekomendasi atau saran untuk meningkatkan efisiensi operasi.
- 4) Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
- Pelaksanaan pemeriksaan audit yang telah di dukung dan disetujui oleh manajemen merupakan ketentuan yang harus dilakukan dalam melaksanakan pemeriksaannya. Program pemeriksaan internal dapat

dipakai sebagai tolok ukur bagi para pelaksana pemeriksa. Empat langkah kerja Pelaksanaan pemeriksaan yaitu:

- a) Perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan internal harus merencanakan setiap pelaksanaan audit.
 - b) Pengujian dan pengevaluasian informasi, auditor internal harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan dan mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil audit dalam upaya mencegah segala kecurangan yang mungkin terjadi.
 - c) Penyampaian hasil pemeriksaan, auditor internal harus melaporkan hasil pekerjaan audit mereka.
 - d) Tindak lanjut hasil pemeriksaan, auditor internal harus melakukan tindak lanjut untuk meyakinkan bahwa tindakan tepat telah diambil dalam melaporkan temuan audit kecurangan.
- 5) Manajemen Bagian Audit Internal

Dalam manajemen audit internal seorang pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat yang meliputi:

- a) Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung jawab : pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagi bagian audit internal dengan jelas.
- b) Perencanaan : Pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal.
- c) Kebijakan dan prosedur : Pimpinan audit internal harus membuat berbagai kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan sebagai pedoman oleh staf pemeriksa.
- d) Manajemen personel : Pimpinan audit internal harus menetapkan program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal.
- e) Pengendalian mutu : audit internal harus menetapkan dan mengembangkan pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk mengevaluasi serta mendeteksi dan mencegah kecurangan atau manipulasi dari berbagai kegiatan yang ada diseluruh bagian perusahaan.

Sedangkan menurut Hiro Tugiman (2006:13) standar profesi audit internal

meliputi:

- 1) Independensi atau kemandirian unit audit internal yang membuatnya terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa dan objektivitas para pemeriksa internal,
- 2) Keahlian dan penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama para auditor internal,
- 3) Lingkup pekerjaan audit internal,
- 4) Pelaksanaan tugas audit, dan
- 5) Manajemen unit audit internal.

2.1.1.5 Indikator Audit Internal

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi Audit

Internal menurut Hery (2010) yaitu:

- 1) Independensi.
- 2) Kemampuan Professional.
- 3) Ruang Lingkup Pekerjaan.
- 4) Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan.

Adapun indikator untuk mengukur implementasi Audit Internal yang disampaikan oleh Hery (2013) sebagai berikut:

- 1) Watchdog.
- 2) Kinerja Auditee.
- 3) Preventif.
- 4) Konsultan Internal.
- 5) Pengetahuan.

Sedangkan menurut Hiro Tugiman (2011:53-75) terdapat empat indikator yang digunakan untuk kualitas audit yaitu:

- 1) Adanya perencanaan audit.
- 2) Pengujian dan pengevaluasian informasi.
- 3) Penyampaian hasil pemeriksaan.
- 4) Tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Berdasarkan indikator-indikator yang diperoleh dari beberapa sumber referensi diatas, maka indikator audit internal yang akan digunakan dalam penelitian yaitu, adanya perencanaan audit, pengujian dan pengevaluasian informasi, penyampaian hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2.1.2 Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan suatu cara dalam mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pengendalian ini sangat penting dalam dalam mencegah dan mendeteksi

kecurangan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud ataupun tidak berwujud.

2.1.2.1 Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Romney dan Steinbart (2015:216) pengendalian internal (*internal control*) adalah sebagai berikut:

“Pengendalian internal adalah sebuah proses yang diimplementasikan untuk memberikan jaminan yang memenuhi beberapa objektif dari pengendalian internal, diantaranya yaitu menjaga aset, menjaga catatan dalam detail yang cukup untuk pelaporan aset perusahaan yang tepat dan akurat, menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, menyiapkan laporan keuangan dengan kriteria yang ditentukan, mendorong kekuatan dalam hal manajerial, dan memenuhi persyaratan dari regulasi dan peraturan yang ada”.

Sedangkan menurut Hery (2013:159) menyatakan bahwa:

“Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan”.

Hal senada dikemukakan oleh Mulyadi (2013:6) menjelaskan bahwa pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Pengendalian intern adalah bagian dari sistem yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:221) menyatakan bahwa:

“Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan-tujuan tertentu”.

Berdasarkan keempat pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pengendalian internal adalah suatu prosedur yang diimplementasikan untuk menjaga kekayaan atau aset perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan, menyampaikan informasi yang tepat dan akurat, serta mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.1.2.2 Unsur Pengendalian Internal

Menurut COSO (2013:4) unsur-unsur pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

“Internal control consist of five integrated components:

- 1) *Control Environment*
- 2) *Risk Assessment*
- 3) *Control Activities*
- 4) *Information and Communication*
- 5) *Monitoring Activities*”

Agar lebih jelas, berikut ini akan dijelaskan kelima komponen pengendalian internal tersebut:

1) *Control environment*

menetapkan tujuan dari sebuah organisasi, yang mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Ini adalah dasar untuk semua komponen lain dari pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. *Control environment* yang kuat terdiri dari berbagai faktor yang bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran pengendalian orang-orang yang menerapkan kontrol bagi seluruh entitas. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a) *Integrity and ethical values*

Laporan COSO mencatat bahwa manajer entitas dikelola dengan baik telah semakin diterima pandangan bahwa "etika bayar bahwa perilaku etis adalah bisnis yang baik". dalam rangka untuk menekankan pentingnya integritas dan etika

nilai-nilai di antara semua personil organisasi, CEO dan anggota lain dari *top management*.

- b) *Commitment to competence*
Kompetensi seharusnya berhubungan terhadap pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk memenuhi tugas yang terdapat dalam suatu pekerjaan. Komitmen terhadap kompetensi termasuk juga pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi tertentu atas suatu pekerjaan dan bagaimana tingkatan tersebut menerjemahkan kedalam persyaratan keahlian dan pengetahuan.
- c) *Board of directors and audit committee*
Susunan dewan direksi dan komite audit dan cara di mana mereka menjalankan tanggung jawab pemerintahan dan pengawasan mereka memiliki dampak yang besar pada lingkungan pengendalian. faktor yang mempengaruhi efektivitas dewan dan komite audit meliputi kemerdekaan mereka yang diperoleh dari manajemen.
- d) *Management's philosophy and operating style*
Karakteristik dapat membentuk bagian dari filsafat dan gaya operasi manajemen dan berdampak pada lingkungan pengendalian. Karakteristik tersebut yaitu mengawasi resiko bisnis, perilaku dan tindakan terhadap laporan keuangan, pemilihan terhadap prinsip akuntansi yang ada, mengerti resiko yang terkait dengan IT.
- e) *Organizational structure*
Struktur organisasi dalam suatu organisasi perusahaan bertujuan menyediakan kerangka kerja untuk aktivitas dalam mencapai tujuan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Hal yang cukup signifikan dalam struktur organisasi adalah area kunci atas wewenang , tanggung jawab dan ketepatan pelaporan.
- f) *Assignment of authority and responsibility*
Tugas wewenang dan tanggung jawab meliputi keterangan tentang bagaimana dan kepada siapa wewenang dan tanggung jawab untuk semua kegiatan entitas ditandatangani, dan harus memungkinkan setiap individu untuk mengetahui bagaimana tindakannya saling berhubungan dengan orang lain untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan entitas dan untuk apa diadakan tanggung jawab bagi setiap individu.
- g) *Human resources policies and practices.*
Kebijakan dan praktek dalam pengelolaan sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketercukupan tenaga kerja dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia ini seperti kebijakan perusahaan dalam prosedur perekrutan, program magang, pelatihan, evaluasi, *counseling*, promosi,

kompensasi dan tindakan perbaikan. Di beberapa perusahaan, kebijakan yang diterapkan bisa saja tidak diformalkan, tetapi tetap ada dan dikomunikasikan.

2) *Risk assessment*

Identifikasi dan analisis risiko yang relevan dengan pencapaian tujuannya entitas, membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

3) *Control activities*

kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa manajemen yang diarahkan telah dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

a) *Authorization controls*

Tujuan utama dari prosedur otorisasi yang tepat adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi disetujui oleh personil manajemen yang bertindak dalam lingkup kewenangannya.

b) *Segregation of duties*

Pemisahan yang kuat dari tugas melibatkan pemisahan otorisasi transaksi, mempertahankan hak atas aset, dan menjaga akuntabilitas pencatatan dalam catatan akuntansi. Kegagalan untuk mempertahankan pemisahan tugas memungkinkan bagi seorang individu untuk melakukan kesalahan atau penipuan dan kemudian berada dalam posisi untuk menyembunyikan dalam normal kegiatan tugas yang dilakukan.

c) *Information processing controls*

Kontrol pengolahan informasi mengatasi risiko yang terkait dengan otorisasi, kelengkapan dan keakuratan transaksi. Kontrol ini sangat relevan dengan audit laporan keuangan. Kebanyakan entitas, terlepas dari ukurannya sekarang menggunakan komputer untuk pengolahan informasi secara umum dan pada khususnya untuk sistem akuntansi. Dalam kasus tersebut, hal ini berguna untuk lebih mengelompokkan kontrol pengolahan informasi sebagai kontrol umum dan pengendalian aplikasi.

d) *Physical controls*

Kontrol fisik bersangkutan dengan membatasi dua jenis akses ke aset dan catatan penting yaitu akses fisik langsung dan akses langsung melalui penyusunan atau pengolahan dokumen seperti pesanan penjualan dan *voucher* pencairan yang mengizinkan penggunaan atau disposisi *asset*.

e) *Performance review*

Contoh penilaian kinerja meliputi tinjauan manajemen dan analisis laporan yang meringkas detail dari saldo rekening seperti neraca saldo umur piutang, laporan pengeluaran kas oleh departemen atau laporan kegiatan penjualan dan laba kotor oleh pelanggan atau wilayah, penjual, atau jajaran

produk, kinerja aktual terhadap anggaran, perkiraan, atau jumlah periode sebelumnya, serta hubungan set data yang berbeda seperti data operasi *nonfinancial* dan data keuangan.

4) *Information and communication*

Information and communication adalah identifikasi, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan orang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka.

5) *Monitoring*

Monitoring adalah proses yang menilai kualitas internal kinerja kontrol.

Sedangkan menurut Mulyadi (2017:130) unsur pokok sistem pengendalian

internal ada 4 unsur, yaitu:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
- 2) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
- 3) Praktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

2.1.2.3 Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Hery (2013:160) tujuan pengendalian internal tidak lain adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa:

- 1) Aset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu (perorangan) oknum karyawan tertentu. Dengan demikian, pengendalian internal diterapkan agar supaya seluruh aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan, pencurian, dan penyalahgunaan, yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan perusahaan.
- 2) Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil resiko baik atas salah saji laporan keuangan yang disengaja (kecurangan) maupun yang tidak disengaja (kelalaian).
- 3) Karyawan telah menaati hukum dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan menurut Arens, Elder, dan Beasley (2015:340), biasanya manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif yaitu:

- 1) Reliabilitas pelaporan keuangan
Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.
- 2) Efisiensi dan efektivitas operasi
Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.
- 3) Ketaatan pada hukum dan peraturan
Section 404 mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain mematuhi ketentuan hukum dalam Section 404, organisasi organisasi publik, nonpublik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti UU perlindungan lingkungan dan hak sipil, sementara yang

lainnya berkaitan erat dengan akuntansi seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

2.1.2.4 Komponen-Komponen Pengendalian Internal

Menurut IAPI (2011:319), komponen pengendalian intern terdiri dari :

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup faktor-faktor berikut ini:

a) Integritas dan Nilai Etika

Merupakan produk dari standar etika dan perilaku entitas, bagaimana hal ini dikomunikasikan, dan ditegakkan dalam praktik. Standar tersebut mencakup tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin menyebabkan personel melakukan tindakan tidak jujur, melanggar hukum, atau melanggar etika. Standar tersebut juga mencakup komunikasi nilai-nilai dan standar perilaku entitas kepada personel melalui pernyataan kebijakan dan kode etik serta dengan contoh nyata.

b) Komitmen Terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat tersebut diterjemahkan ke dalam persyaratan keterampilan dan pengetahuan.

c) Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit

Atribut yang berkaitan dengan dewan komisaris atau komite audit ini mencakup independensi dewan komisaris atau komite audit dari manajemen, pengalaman dan tingginya pengetahuan anggotanya, luasnya keterlibatan dan kegiatan pengawasan, memadainya tindakan, tingkat sulitnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dewan atau komite tersebut kepada manajemen, dan interaksi dewan atau komite tersebut dengan auditor intern dan ekstern.

d) Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen

Falsafah dan gaya operasi manajemen menjangkau tentang karakteristik yang meliputi antara lain; pendekatan manajemen dalam mengambil dan memantau risiko usaha; sikap dan tindakan manajemen terhadap pelaporan keuangan dan upaya manajemen untuk mencapai anggaran, laba serta tujuan bidang keuangan dan sasaran operasi lainnya.

- e) Struktur Organisasi
Struktur organisasi suatu entitas memberikan kerangka kerja menyeluruh bagi perencanaan, pengarahan, dan pengendalian operasi. Selain itu, struktur organisasi harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab dalam entitas dengan cara yang semestinya.
 - f) Pembagian Wewenang dan Tanggung Jawab
Metode ini mempengaruhi pemahaman terhadap hubungan pelaporan dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam entitas.
 - g) Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia
Praktik dan kebijakan karyawan berkaitan dengan pemekerjaan, orientasi, pelatihan, evaluasi, bimbingan, promosi, dan pemberian kompensasi, dan tindakan perbaikan.
- 2) Penaksiran Risiko
- Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan seperti berikut ini:
- a) Perubahan dalam lingkungan operasi. Perubahan dalam lingkungan peraturan dan operasi dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda secara signifikan.
 - b) Personel baru. Personel baru mungkin memiliki okus yang berbeda atas atau pemahaman terhadap pengendalian intern.
 - c) Sistem informasi baru atau yang diperbaiki. Perubahan signifikan dan cepat dalam sistem informasi dapat mengubah risiko berkaitan dengan pengendalian intern.
 - d) Pertumbuhan yang pesat. Perluasan operasi yang signifikan dan cepat dapat memberikan tekanan terhadap pengendalian dan meningkatkan risiko kegagalan dalam pengendalian.
 - e) Teknologi baru. Pemasangan teknologi baru kedalam operasi atau sistem informasi dapat mengubah risiko yang berhubungan dengan pengendalian intern.
 - f) Lini produk, produk, atau aktivitas baru. Dengan masuk ke bidang bisnis atau transaksi yang di dalamnya entitas belum memiliki pengalaman dapat mendatangkan risiko baru yang berkaitan dengan pengendalian intern.
 - g) Restrukturisasi korporat. Restrukturisasi dapat disertai dengan pengurangan staf dan perubahan dalam supervise dan pemisahan tugas yang dapat mengubah risiko yang berkaitan dengan pengendalian intern
 - h) Operasi luar negeri. Perluasan atau pemerolehan operasi luar negeri membawa risiko baru atau seringkali risiko yang unik

yang dapat berdampak terhadap pengendalian intern, seperti risiko tambahan atau risiko yang berubah dari transaksi mata uang asing

- i) Penerbitan standar akuntansi baru. Pemakaian prinsip akuntansi baru, atau perubahan prinsip akuntansi dapat berdampak terhadap risiko dalam penyusutan laporan keuangan.
- 3) Aktivitas Pengendalian
- Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Umumnya, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini:
- a) *Review* kinerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya; menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan; dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas, seperti review oleh manajer kredit, konsumen sebuah bank atas laporan cabang, wilayah, tipe pinjaman, tentang persetujuan dan pengumpulan pinjaman.
 - b) Pengolahan informasi. Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan aktivitas pengendalian informasi (application control). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemerolehan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian intern ini berlaku untuk mainframe, mini komputer, dan lingkungan pemakaian akhir (end-user). Pengendalian aplikasi berlaku untuk pengolahan aplikasi secara individual. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi, adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.
 - c) Pengendalian fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi, dari akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files; dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum pada catatan pengendali. Luasnya pengendalian fisik yang ditujukan untuk mencegah pencurian terhadap aktiva adalah relevan keandalan penyusutan laporan keuangan, dan oleh karena itu relevan dengan audit, adalah

tergantung dari keadaan seperti jika aktiva rentan terhadap perlakuan tidak semestinya.

- d) Pemisahan tugas. Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidak beresan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.
- 4) Informasi dan Komunikasi
- Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (termasuk peristiwa dan keadaan) dan untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang, ekuitas yang bersangkutan. Sistem informasi mencakup metode dan catatan yang digunakan untuk:
- a) Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah
 - b) Menjelaskan pada saat yang tepat transaksi secara cukup rinci untuk memungkinkan penggolongan semestinya transaksi untuk pelaporan keuangan.
 - c) Mengukur nilai transaksi dengan cara sedemikian rupa sehingga memungkinkan pencatatan nilai moneter semestinya dalam laporan keuangan.
 - d) Menentukan periode waktu terjadinya transaksi untuk memungkinkan pencatatan transaksi dalam periode akuntansi semestinya.
 - e) Menyajikan transaksi semestinya dan pengungkapan yang berkaitan dalam laporan keuangan.
- 5) Pemantuan
- Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Dalam banyak entitas, auditor intern atau personel yang melaksanakan fungsi semacam itu, membantu untuk melakukan pemantauan atas aktivitas entitas melalui evaluasi secara terpisah.

2.1.2.5 Indikator Pengendalian Internal

Menurut Wiratna Sujarweni (2015:71) pengendalian internal memiliki 5

(lima) komponen utama sebagai berikut:

- 1) Lingkungan Pengendalian
 - a) Komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.
 - b) Filosofi yang dianut oleh manajemen dan gaya operasional yang dipakai.
 - c) Struktur Organisasi.
- 2) Penaksiran Risiko
 - a) Risiko strategis.
 - b) Risiko finansial.
 - c) Risiko informasi
- 3) Aktivitas Pengendalian
 - a) Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan.
 - b) Pembagian tugas dan tanggung jawab.
 - c) Rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang baik.
 - d) Perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan perusahaan.
 - e) Pemeriksaan Terhadap Kinerja Perusahaan.
- 4) Informasi dan Komunikasi
 - a) Bagaimana transaksi diawali.
 - b) Bagaimana data dicatat ke dalam formulir yang siap dimasukkan ke sistem komputer.
 - c) Bagaimana file data dibaca, diorganisasi, dan diperbaharui isinya.
 - d) Bagaimana data diproses agar menjadi informasi dan informasi diproses lagi menjadi informasi yang lebih berguna bagi pembuat keputusan.
 - e) Bagaimana informasi yang baik dilakukan.
 - f) Bagaimana transaksi berhasil.
- 5) Pemantauan
 - a) Supervisi yang efektif.
 - b) Akuntansi pertanggungjawaban.
 - c) Audit internal.

Sedangkan Indikator tentang pengendalian internal menurut Siti Kurnia

Rahayu dan Ely Suhayati (2013:221) adalah sebagai berikut :

- 1) Keandalan Pelaporan Keuangan.
- 2) Menjaga Kekayaan dan Catatan Transaksi.
- 3) Kepatuhan Terhadap Hukum Yang Berlaku.
- 4) Efektivitas dan Efisiensi Operasi.

Adapun menurut Mulyadi (2016) yang dapat digunakan untuk dijadikan indikator adalah sebagai berikut:

1. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3. Mendorong efisiensi kerja atau operasional perusahaan.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Berdasarkan indikator-indikator yang dikemukakan beberapa pakar diatas, maka indikator pengendalian internal yang akan digunakan dalam penelitian yaitu, menjaga keamanan harta milik suatu organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi kerja atau operasional perusahaan, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.1.3 Pencegahan Kecurangan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan senantiasa menghadapi berbagai resiko diantaranya adalah resiko terjadinya kecurangan (*fraud*). Kecurangan tidak boleh terjadi terus-menerus dalam suatu perusahaan, maka harus adanya pencegahan dan pendeteksian secara dini. Bila kecurangan terus dibiarkan, maka hal ini akan membuat kondisi perusahaan menjadi tidak sehat dan dapat berakhir pada kebangkrutan.

2.1.3.1 Pengertian Pencegahan Kecurangan

Karyono (2013:47-48) mendefinisikan pencegahan kecurangan (*fraud*) bahwa mencegah *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya kecurangan (*fraud*). Sedangkan menurut Fitrawansyah (2014:16) menyatakan bahwa pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan aktivitas memerangi fraud dengan biaya yang murah. Pencegahan kecurangan bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada diobati. Hal

senada dikemukakan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) mendefinisikan pencegahan kecurangan adalah segala upaya yang dikerahkan untuk membuat pelaku *fraud* tidak berani melakukan ataupun kalau *fraud* terjadi maka dampaknya diharapkan sangat minim.

Berdasarkan ketiga pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pencegahan kecurangan merupakan segala upaya yang dilakukan untuk meminimalisir sebab-sebab terjadinya tindakan kecurangan yang bertujuan mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan sehingga kecurangan itu tidak terjadi dan membuat para pelaku *fraud* tidak berani melakukannya.

2.1.3.2 Tujuan Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Karyono (2013:47) tujuan pencegahan *fraud* adalah sebagai berikut:

“Pencegahan *fraud* bertujuan untuk:

- 1) *Prevention*: mencegah terjadinya kecurangan.
- 2) *Detterence*: menangkal pelaku potensial.
- 3) *Description*: mempersulit gerak langkah pelaku *fraud*.
- 4) *Recertification*: mengidentifikasi kegiatan beresiko tinggi dan kelemahan pengendalian internal.
- 5) *Civil action prosecution*: tuntutan kepada pelaku.”

Sedangkan menurut BPKP (2008:37) dalam Yuriswati (2017) tujuan pencegahan kecurangan yaitu:

“Tujuan pencegahan kecurangan antara lain:

- 1) Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan.
- 2) Menurunkan tekanan pada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya.
- 3) Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan *fraud* yang dilakukan.”

2.1.3.3 Bentuk-Bentuk Kecurangan (*Fraud*)

Menurut *Examination Manual 2006* dari *Association of Certified Fraud Examiner* dalam Karyono (2013), *fraud* (kecurangan) terdiri atas tiga kelompok besar yaitu:

- 1) Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*), meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain.
- 2) Kecurangan Laporan (*Fraudulent Statement*), meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.
- 3) Korupsi (*Corruption*), meliputi kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, dimana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah.

Adapun menurut Kingsley Adeyemo (2012) mengklasifikasikan bentuk *fraud*, khususnya di bidang perbankan, berdasarkan pelakunya yaitu:

- 1) *Management Fraud* (Kecurangan Manajemen)
Menurut Fakunle (2006:173) dalam Kingsley Adeyemo (2012), kecurangan manajemen berupa pemanipulasian transaksi dan akun-akun yang dilakukan oleh staff senior demi kepentingan pribadi pihak tertentu. Kecurangan manajemen biasa dilakukan oleh pihak manajemen, seperti direktur atau manajer. Korban kecurangan ini biasanya para investor dan kreditor dengan laporan keuangan sebagai media tindakan kecurangan.
- 2) *Insiders or Employee Fraud* (Kecurangan Internal/ Karyawan)
Kecurangan ini disebut juga kecurangan non-manajemen, dimana pelakunya adalah karyawan bank atau organisasi itu sendiri. Tindakan kecurangan ini bertujuan untuk memperoleh uang atau properti dari organisasi, demi keuntungan pribadi pelaku. Menurut Olatunji (2009:183) dalam Kingsley Adeyemo (2012), *Insiders fraud* di bank melibatkan penipuan, pemalsuan dokumen, tindakan yang melewati batas otoritas, serta penggelapan dana.
- 3) *Outsiders Fraud* (Kecurangan Eksternal)
Kecurangan ini dilakukan oleh nasabah dan non-nasabah bank. Fungsi utama bank komersial adalah untuk menyalurkan dana

dari pihak yang kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Dalam menjalankan fungsi ini, bank dan pegawai bank berhubungan langsung dengan nasabah maupun non-nasabah bank, yang mana dapat menimbulkan risiko kecurangan.

- 4) *Insiders/Outsiders Fraud* (Kecurangan Pihak Dalam/ Luar)
Kecurangan ini merupakan tindakan kerjasama antara karyawan bank atau organisasi dengan nasabah atau non-nasabah dengan tujuan memperoleh uang dari bank atau organisasi tersebut.

2.1.3.4 Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Valery G Kumaat (2011:239) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong terjadinya kecurangan (*fraud*) adalah sebagai berikut:

- 1) Desain pengendalian internal kurang tepat, sehingga meninggalkan celah resiko.
- 2) Praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman (*common business sense*) yang berlaku.
- 3) Pemantuan (pengendalian yang tidak konsisten terhadap implementasi proses bisnis).
- 4) Evaluasi yang tidak berjalan terhadap proses bisnis yang berlaku.

Sedangkan, Jack Bologna mengemukakan penyebab terjadinya kecurangan dalam buku Karyono (2013:10) yang dikenal sebagai teori GONE, yaitu:

- 1) *Greed* (Keserakahan), berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam diri setiap orang.
- 2) *Opportunity* (Kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi yang terbuka sehingga dapat membuat seseorang untuk melakukan kecurangan.
- 3) *Need* (Kebutuhan), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya secara wajar.
- 4) *Exposure* (Pengungkapan), berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapnya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan.

2.1.3.5 Indikator Pencegahan Kecurangan

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2007:162) ada beberapa penerapan agar tindak kecurangan dapat diminimalkan dengan penerapan antara lain:

- 1) *Risk Analysis*
- 2) Implementasi
- 3) Sanksi
- 4) Monitoring

Sedangkan menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:59) mengemukakan bahwa terdapat beberapa tata kelola untuk mencegah kecurangan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Budaya Jujur dan Etika Yang Tinggi.
- 2) TanggungJawab Manajemen untuk Mengevaluasi Pencegahan Kecurangan.
- 3) Pengawasan Oleh Komite Audit.

Adapun menurut Irham Fahmi (2014:326), indikator yang digunakan dalam pencegahan kecurangan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengendalian intern.
- 2) Memberi insentif yang sesuai bagi pegawai.
- 3) Melakukan seleksi dan pembinaan pegawai secara berkualitas.
- 4) Meningkatkan aktivitas pemeriksaan.
- 5) Menumbuhkembangkan iklim keterbukaan.
- 6) Adanya suri tauladan yang baik dari pimpinan.
- 7) Penerapan sanksi yang tegas.

Berdasarkan indikator diatas, maka ditarik kesimpulan indikator yang akan digunakan dalam penelitian yaitu, meningkatkan pengendalian intern, meningkatkan aktivitas pemeriksaan, menumbuhkembangkan iklim keterbukaan, dan penerapan sanksi yang tegas.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu alur pola pikir yang akan dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam memperkuat sub fokus yang melatarbelakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan menjelaskan pokok masalah penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Perbankan merupakan suatu industri yang didalamnya menjalankan kegiatan bisnis seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Di industri perbankan pada saat ini sudah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir dan industri ini pun menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Seiring dengan berkembangnya industri perbankan, maka kegiatan dan masalah yang akan dihadapi semakin kompleks, dengan demikian semakin besar juga untuk terjadinya tindakan *fraud*. Kasus *fraud* yang terjadi di perbankan biasanya melibatkan orang dalam perusahaan tersebut. Tindakan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan ada berbagai macam seperti melakukan korupsi, penggelembungan dana, dokumen palsu, dan lain-lain. Mengatasi hal ini, para pengamat perbankan mengatakan perlunya pengawasan yang lebih dengan memperbaiki *internal control* (audit internal) dan pengendalian internal di dalam perusahaan tersebut untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*).

Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah dengan meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*). Dengan demikian perlu

adanya pencegahan dan pendeteksian kecurangan, dimana untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan ini diantaranya perlu peran dari audit internal.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:65) Audit Internal memainkan peranan penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pengendalian anti fraud telah berjalan efektif. Aktivitas Audit Internal dapat mencegah sekaligus mendeteksi risiko fraud. Sedangkan menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:36) audit internal memiliki peranan dalam Mencegah *Fraud (Fraud Prevention)* dan Pendeteksian *Fraud (Fraud Detection)*.

Konsep diatas didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2013) yang meneliti mengenai pengaruh audit internal terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud* menunjukkan bahwa peranan audit internal dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* sudah cukup memadai dan audit internal berpengaruh terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Selain itu menurut Theresa Festi, dkk (2014) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan. Korelasi antara peran audit internal dengan pencegahan kecurangan memiliki hubungan yang kuat. Semakin baik peran audit internal maka semakin tinggi pencegahan kecurangan.

Permasalahan yang sering terjadi di perusahaan ataupun organisasi salah satunya adalah tindakan kecurangan. Salah satu faktor yang dapat mencegah terjadinya *fraud* yaitu pengendalian internal. Dengan adanya pengendalian internal di dalam perusahaan tentu saja sangat membantu untuk pencegahan terjadinya *fraud*.

Menurut Karyono (2013:47) Pencegahan *fraud* pada bab ini, yang utama ialah dengan menetapkan sistem pengendalian internal dalam setiap aktivitas organisasi. Pengendalian internal itu agar dapat efektif mencegah *fraud* harus andal dalam rancangan struktur pengendaliannya dan praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:64) menyatakan bahwa pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dilaksanakan dengan cara meningkatkan pengendalian internal.

Konsep diatas didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ademola *et al* (2015) menyatakan bahwa pembentukan pengendalian internal memainkan peranan penting dalam mencagah kecurangan. Selain itu, hasil yang sama ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Soleman (2013) bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:96) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dalam penelitian ini dapat diambil keputusan hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif menurut Sugiyono (2017:176) merupakan dugaan terhadap nilai suatu variabel dalam satu sampel walaupun di dalamnya bisa terdapat beberapa kategori, maka peneliti mengajukan Hipotesis Deskriptif sebagai berikut:

H₁ : Penerapan Audit Internal pada Bank BJB belum optimal.

H₂ : Penerapan Pengendalian Internal pada Bank BJB belum optimal.

H₃ : Penerapan Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Bank BJB belum optimal.